



Faktor Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Kawasan Timur Indonesia

Abd Hakim Aflaha^{1*}, Zulgani², Rosmeli³

^{1,2,3} Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; hakimdeska25@gmail.com, gzulgani@gmail.com, rosmeli@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available online
<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:
Regional Disparities, Eastern Indonesia, Human Development Index, Fiscal Decentralization, Foreign Direct Investment

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Abd Hakim Aflaha , Zulgani , Rosmeli" Faktor Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Kawasan Timur Indonesia" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 June: 2026

ABSTRACT

Regional development disparities remain a major issue in Eastern Indonesia (KTI). Despite possessing significant natural resource potential, economic development across provinces in KTI shows a considerable gap compared to Western Indonesia. This disparity is reflected in differences in income levels, the quality of human resources, local fiscal capacity, and the distribution of investment across regions. This study aims to: (1) analyse the level of inter-provincial regional development inequality in Eastern Indonesia; (2) analyse the level of intra-regional development inequality between districts/cities in Eastern Indonesia; and (3) analyse the influence of the Human Development Index, Fiscal Decentralisation, and Foreign Direct Investment on regional development inequality in Eastern Indonesia. Secondary data for the period 2010–2024 were analysed using multiple linear regression within a panel data framework via the EViews 14 application, with inequality measured using the Williamson Index and the Theil Index. The results of the Williamson Index reveal significant variations in disparity across provinces. Gorontalo falls into the low inequality category, Bali and several provinces in Sulawesi into the moderate category, whilst West Papua and Papua fall into the very high category. The results of the Theil Index show that Central Sulawesi and West Nusa Tenggara have the highest levels of intra-regional inequality, whilst Gorontalo and West Sulawesi have relatively low levels. Estimates from the selected Random Effects Model indicate that the HDI has a negative and significant effect on inequality as measured by the Williamson and Theil indices. DESF has a non-significant negative effect in the Williamson model, but a significant positive effect in the Theil model. Furthermore, FDI has a positive and significant effect on inequality as measured by the Williamson and Theil indices..

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan ribuan pulau memiliki keragaman kondisi geografis, sosial, dan ekonomi antardaerah. Karakter kepulauan ini membuat perkembangan antarprovinsi tidak mungkin seragam karena setiap wilayah memiliki aksesibilitas, potensi, dan tantangan pembangunan yang berbeda. Akibatnya, lintasan pembangunan antardaerah bergerak tidak sama dan menimbulkan ketimpangan spasial yang relatif persisten di Indonesia. Dimensi keruangan menjadi penting untuk memahami disparitas pembangunan Indonesia, serta menunjukkan bahwa kesenjangan antardaerah merupakan ciri yang nyata dalam proses pembangunan nasional (Kurniawan et al., 2019).

Secara umum, wilayah pembangunan Indonesia dibagi ke dalam dua kawasan besar, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). KBI meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang sejak lama menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, serta konsentrasi pembangunan nasional. Sementara itu, KTI mencakup wilayah Indonesia bagian timur yang sebaran pulaunya lebih terpencar dengan karakter geografis yang lebih kompleks, secara administratif terdiri atas 17 provinsi mulai dari Bali hingga Papua Pegunungan. Pembagian kawasan ini tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga mencerminkan perbedaan tingkat kemajuan pembangunan, di mana KTI memiliki karakter wilayah yang khas berupa kepulauan, wilayah perairan yang luas, banyak daerah pedalaman, serta jarak antarpusat ekonomi yang berjauhan sehingga aktivitas ekonomi modern dan distribusi layanan publik menjadi lebih sulit dan mahal dibandingkan wilayah barat.

Masalah ketimpangan ekonomi antardaerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, melainkan juga antara KBI dan KTI. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antardaerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai (Kuncoro, 2004). Provinsi-provinsi di Pulau Jawa cenderung lebih berkembang dibanding provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, terkait dengan arah kebijakan pembangunan masa lalu yang lebih terkonsentrasi pada wilayah tersebut sehingga membentuk struktur pembangunan yang tidak seimbang (Kurniawan et al., 2019). Seiring dengan pulihnya perekonomian Indonesia, pertumbuhan tersebut tidak mencerminkan kondisi di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan ekonomi yang pesat cenderung terjadi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sedangkan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa relatif lebih tertinggal (Kuncoro, 2014).

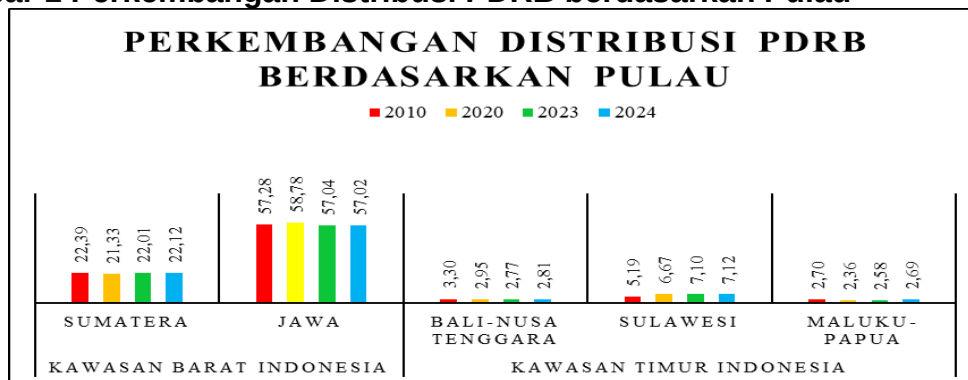
Meskipun desentralisasi telah berjalan lebih dari dua dekade, pembangunan ekonomi tetap terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah di luar Pulau Jawa berkembang lebih lambat. Program percepatan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional ditujukan untuk pemerataan, tetapi realisasinya masih lebih banyak berpihak pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera sehingga dampak pemerataan bagi Indonesia timur membutuhkan waktu lebih panjang (Fajri et al., 2023). Pembangunan nasional masih terkonsentrasi di KBI sehingga capaian ekonomi dan sosial di kawasan barat relatif lebih tinggi, sementara KTI tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan (Dewanto & Rahmawati, 2021).

Di sisi lain, KTI menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar,

mulai dari pertambangan, energi, kehutanan, perikanan, hingga komoditas pertanian strategis. Namun, melimpahnya kekayaan alam tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, karena banyak daerah di KTI masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya pendapatan, serta akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar yang belum memadai. Terdapat ironi pembangunan, di mana meskipun KTI memiliki wilayah luas dan sumber daya alam melimpah, kawasan ini tetap menghadapi ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan dibanding KBI (Rosmeli & Nurhayani, 2014). Kontribusi pertumbuhan nasional secara konsisten lebih banyak berasal dari provinsi KBI karena dukungan infrastruktur dan investasi yang lebih terkonsentrasi, sehingga ketertinggalan KTI tetap bertahan meskipun kaya sumber daya alam (Nugraha & Prayitno, 2020).

Kondisi ketimpangan ini dapat dilihat secara empiris melalui data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian dalam studi empiris, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan dan ketimpangan antardaerah, di mana gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke KBI selama lebih dari lima dasawarsa terakhir (Kuncoro, 2014).

Gambar 1 Perkembangan Distribusi PDRB berdasarkan Pulau



Sumber: BPS 2024 (data diolah)

Berdasarkan data BPS tahun 2024, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh KBI, di mana Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB nasional sebesar 57,02%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,12%. Sementara itu, kontribusi KTI masih sangat rendah, yaitu Pulau Sulawesi sebesar 7,12%, Pulau Bali–Nusa Tenggara sebesar 2,81%, dan Pulau Maluku–Papua hanya sebesar 2,69% (BPS, 2025). Data ini mempertegas bahwa ketimpangan antarwilayah dan antarpulau di Indonesia masih terus berlanjut. Ketimpangan wilayah tidak terjadi secara alami, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan ekonomi yang saling berkaitan, terdapat beberapa faktor mempengaruhi kesenjangan ketimpangan antar wilayah diantaranya. Indeks Pembangunan Manusia Sukmawati & Robertus, (2023), Azim et al., (2022), dan Aditya et al., (2025). Desentralisasi Fiskal Liu et al., (2014), Santi & Iskandar, (2021) dan Korimah & Yuniasih, (2019). dan terakhir Penanaman Modal Asing Rosmeli, (2015), Benius & Veronika, (2025), Salsabillah & Fitanto, (2024), dan Pourfaraj et al., (2019).

Ketimpangan juga tercermin dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM KBI secara konsisten berada di atas capaian nasional, meningkat dari 73,32 pada tahun 2020 menjadi 75,44 pada tahun 2024, terutama didorong oleh Pulau Jawa yang memiliki IPM tertinggi. Sebaliknya, IPM KTI meskipun mengalami peningkatan dari 68,54 pada tahun 2020 menjadi 70,28 pada tahun 2024, masih jauh tertinggal di bawah KBI maupun rata-rata nasional. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Maluku–Papua yang mencatat IPM terendah dan bahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 (BPS, 2024).

Dalam konteks KTI, permasalahan tidak hanya terletak pada rendahnya pertumbuhan, tetapi juga pada belum meratanya distribusi pembangunan antarprovinsi, di mana ketimpangan yang terjadi tidak hanya antara KTI dan KBI, tetapi juga antarprovinsi di dalam KTI itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, sehingga penelitian ini mengangkat judul "Faktor Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Kawasan Timur Indonesia".

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dianalisis menggunakan model regresi linier berganda dalam kerangka data panel. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Eviews 14 untuk mengestimasi model regresi data panel. Data Panel merupakan penggabungan data Deret waktu/time series dan data cross section. Dengan kata lain, data panel adalah data yang diperoleh dari data cross section yang diobservasi berulang pada unit individu yang sama pada waktu yang berbeda (Juanda & Junaidi, 2012). Data time series mencakup periode tahun 2010 - 2024, sedangkan data cross section meliputi 13 dari 17 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Dengan demikian jumlah cross section (N) sebanyak 13 dan jumlah time series (T) sebanyak 15 tahun, sehingga total observasi dalam penelitian ini adalah 195 observasi (13x15). Karena setiap unit cross section diamati dalam jumlah periode waktu yang sama, maka data yang digunakan termasuk dalam kategori balanced panel data.

Adapun 13 provinsi tersebut yaitu: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Adapun 4 provinsi lainnya tidak dimasukkan dalam analisis. Hal ini disebabkan adanya pemekaran wilayah pada tahun 2022, di mana Provinsi Papua dimekarkan menjadi tiga provinsi baru (Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan), serta Provinsi Papua Barat dimekarkan menjadi 1 provinsi lagi yaitu (Provinsi Papua Barat Daya). Oleh karena itu, dikarenakan penelitian ini menggunakan rentang data tahun 2010–2024, dan ke 4 provinsi hasil pemekaran tersebut tidak memiliki ketersediaan data yang lengkap dan konsisten sepanjang periode pengamatan 2010-2024.

Untuk menjawab masalah pertama, maka digunakanlah indeks williamson, Indeks Williamson menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Menurut Sjafrizal, (2018) Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antardaerah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat. Adapun formulasi Indeks Williamson ini secara statistik dapat ditampilkan dengan formula rumus sebagai

berikut:

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}{\bar{y}}}$$

Di mana:

y_i = PDRB per kapita ADHB 2010 daerah i (provinsi kawasan timur Indonesia)

$\bar{y}$ = PDRB per kapita ADHB 2010 rata-rata nasional (Indonesia)

f_i = Jumlah penduduk daerah i (provinsi kawasan timur Indonesia)

n = Jumlah penduduk seluruh daerah i (kawasan timur Indonesia)

Dalam pengukuran ketimpangan pembangunan, diperlukan batasan nilai tertentu untuk mengklasifikasikan tingkat perbedaan antarwilayah ke dalam kategori rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi (Sjafrizal, 2008). Adapun klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$
- 2) Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$
- 3) Kesenjangan level tinggi, jika $0,5 < IW \leq 1,0$
- 4) Kesenjangan level sangat tinggi, jika $IW > 1,0$

Untuk menjawab masalah kedua menggunakan indeks theil, Rumus Indeks Theil menurut (Sjafrizal, 2014) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$T = \sum_{i=1}^n \frac{Y_{ij}}{\bar{Y}} \log \left(\frac{y_{ij}/Y}{n_{ij}/N} \right)$$

Keterangan:

T = Indeks Theil

y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten i di provinsi j

Y = Jumlah rata rata PDRB per kapita semua provinsi

n_{ij} = Jumlah penduduk kabupaten i di provinsi j

n = Jumlah penduduk seluruh kabupaten i di provinsi j

Menurut Kuncoro, (2004), Nilai indeks Entropi Theil = 0 dapat diartikan sebagai pemerataan sempurna dan bila indeks semakin menjauh dari nol maka terjadi ketimpangan yang semakin besar.

Untuk menjawab masalah ketiga, alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel :

Model Sederhana

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Model Operasional

$$KPW_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 DESF_{it} + \beta_3 PMA_{it} + e_{it}$$

Dimana:

KPW = Ketimpangan Pembangunan Wilayah hasil dari versi Indeks Williamson dan Indeks Theil

IPM = Indeks Pembangunan Manusia ke-i pada tahun ke-t

DSEF = Desentralisasi Fiskal ke-i pada tahun ke-t

PMA	= Penanaman Modal Asing ke-i pada tahun ke-t
β_0	= Intersep
β_1 sampai β_3	= Koefisien
e	= <i>Standard error</i>
i	= individu ke- i / <i>cross section</i>
t	= Periode waktu ke- t / <i>time series</i>

Metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode (Juanda & Junaidi, 2012), yaitu metode *Metode Common-Constan (The Pooled OLS Method) = PLS*, , Metode *fixed effect model (FEM)* dan Metode *random effect model (REM)*.

Metode Common Efek Model

Metode *Common Effect Model (CEM)* merupakan pendekatan paling sederhana dalam analisis data panel karena hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik antar unit *cross section* maupun waktu.

Metode Fixed Effect Model

Metode *Fixed Effect Model (FEM)* mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antar provinsi dapat diakomodasi melalui perbedaan nilai intersep. Model ini mengakui adanya heterogenitas yang bersifat tetap (*time-invariant*) pada masing-masing provinsi, seperti perbedaan kondisi geografis, struktur ekonomi, kebijakan daerah, maupun kualitas institusi.

Metode Random Effect Model

Metode *Random Effect Model (REM)* mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antar provinsi tidak ditangkap melalui intersep tetap, melainkan dimasukkan ke dalam komponen error (*error term*). Dengan kata lain, variasi antar provinsi dianggap sebagai bagian dari variabel acak yang tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model.

Dugaan model yang digunakan berdasarkan pertimbangan statistik perlu dianalisis agar memperoleh dugaan model yang efisien dan paling baik diantara berbagai pilihan model. Terdapat tiga pengujian statistic yang digunakan dalam data panel untuk menentukan model mana yang paling baik untuk dipilih yaitu:

Uji Chow Test

Chow test atau biasa disebut dengan uji F statistic merupakan pengujian statistic yang bertujuan untuk memilih apakah lebih baik menggunakan model *Common Effect* atau *Fixed Effect*.

Uji Hausmann Test

Hausman test adalah pengujian statistic sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan *fixed effect* atau menggunakan model *random effect*.

Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier dilakukan jika uji Chow memilih *common effect* dan Uji Hausman memilih *random effect*, tetapi jika uji Chow dan uji Hausman konsisten menerima model *fixed effect* adalah model terbaik, maka uji LM tidak perlu dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson yang mampu menggambarkan disparitas pembangunan berdasarkan perbedaan PDRB per kapita dan jumlah penduduk antar wilayah. Didalam konteks penelitian ini, parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHB).

Tabel 1 Indeks Williamson Kawasan Timur Indonesia Tahun 2010-2024

Provinsi-Kawasan Timur Indonesia - Indeks Williamson														
Tahun	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat	Mahuku	Mahuku Utara	Papua Barat	Papua	Kawasan Timur Indonesia
2010	0,30	1,02	0,59	0,46	0,24	0,67	0,52	0,17	0,30	0,43	0,32	1,58	2,84	0,42
2011	0,30	0,81	0,58	0,48	0,27	0,66	0,53	0,17	0,32	0,33	0,33	1,57	2,36	0,35
2012	0,31	0,64	0,59	0,48	0,30	0,66	0,56	0,17	0,32	0,30	0,33	1,54	2,06	0,41
2013	0,32	0,59	0,60	0,48	0,34	0,65	0,54	0,16	0,34	0,29	0,28	1,52	1,95	0,41
2014	0,32	0,52	0,60	0,49	0,32	0,63	0,46	0,15	0,38	0,27	0,27	1,43	1,72	0,40
2015	0,31	0,65	0,61	0,50	0,46	0,62	0,38	0,14	0,38	0,26	0,28	1,39	1,65	0,37
2016	0,31	0,84	0,62	0,50	0,48	0,61	0,41	0,14	0,36	0,25	0,28	1,35	1,73	0,37
2017	0,32	0,76	0,62	0,50	0,51	0,61	0,43	0,13	0,36	0,24	0,27	1,32	1,79	0,37
2018	0,32	0,58	0,62	0,50	0,86	0,62	0,44	0,13	0,35	0,23	0,27	1,33	1,85	0,37
2019	0,31	0,55	0,61	0,51	0,94	0,64	0,45	0,12	0,34	0,22	0,27	1,33	1,29	0,37
2020	0,38	0,70	0,58	0,48	1,08	0,70	0,48	0,17	0,34	0,39	0,35	1,17	1,27	0,36
2021	0,34	0,70	0,57	0,49	1,36	0,69	0,49	0,17	0,39	0,39	0,66	1,30	1,65	0,38
2022	0,40	0,79	0,58	0,51	1,53	0,68	0,50	0,17	0,39	0,39	1,02	1,04	1,76	0,40
2023	0,46	0,73	0,58	0,51	1,52	0,69	0,52	0,17	0,39	0,39	1,12	1,42	1,58	0,40
2024	0,47	0,79	0,58	0,51	1,53	0,70	0,63	0,17	0,39	0,39	1,14	1,63	1,67	0,41
Rata-Rata	0,34	0,71	0,59	0,49	0,78	0,66	0,49	0,16	0,36	0,32	0,48	1,39	1,81	0,39

Sumber: data diolah (2026)

Berikut adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

- 1) Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$
- 2) Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$
- 3) Kesenjangan level tinggi, jika $0,5 < IW \leq 1,0$
- 4) Kesenjangan level sangat tinggi, jika $IW > 1,0$

Tabel 2 Kategori Ketimpangan Wilayah Kawasan Timur Indonesia Tahun 2010-2024

Provinsi	IW	Kategori
Gorontalo	0,16	Rendah
Bali	0,34	Sedang
Sulawesi Utara	0,49	Sedang

Sulawesi Tenggara	0,49	Sedang
Sulawesi Barat	0,36	Sedang
Maluku	0,32	Sedang
Maluku Utara	0,48	Sedang
Kawasan Timur Indonesia	0,39	Sedang
Nusa Tenggara barat	0,71	Tinggi
Nusa Tenggara Timur	0,59	Tinggi
Sulawesi Tengah	0,78	Tinggi
Sulawesi Selatan	0,66	Tinggi
Papua Barat	1,39	Sangat Tinggi
Papua	1,81	Sangat Tinggi

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2 hasil Indeks Williamson selama periode 2010–2024, Berdasarkan tabel rata-rata Indeks Williamson tahun 2010–2024, tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan variasi antarprovinsi. Secara umum, nilai rata-rata Indeks Williamson Kawasan Timur Indonesia sebesar 0,39 yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Provinsi dengan tingkat ketimpangan rendah hanya terdapat pada Gorontalo dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,16. Selanjutnya, beberapa provinsi berada pada kategori ketimpangan sedang, yaitu Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta Kawasan Timur Indonesia secara keseluruhan. Bali memiliki nilai 0,34, sedangkan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 0,49 yang mendekati kategori tinggi. Kategori ketimpangan tinggi ditemukan pada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah memiliki nilai tertinggi dalam kelompok ini yaitu 0,78, diikuti Nusa Tenggara Barat sebesar 0,71. Sementara itu, Papua Barat dan Papua termasuk dalam kategori ketimpangan sangat tinggi dengan nilai masing-masing sebesar 1,39 dan 1,81. Nilai tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia.

Tujuan kedua dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan intra-wilayah provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Ketimpangan intra-wilayah ini diukur menggunakan Indeks Theil yang digunakan untuk melihat kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Theil pada Kawasan Timur Indonesia selama periode 2010–2024, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan intra-wilayah antar kabupaten/kota dalam masing-masing provinsi memiliki variasi yang cukup signifikan. Menurut Kuncoro (2004), nilai Indeks Theil yang mendekati nol menunjukkan kondisi pemerataan yang tinggi, sedangkan nilai yang semakin besar menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Tabel 3 Indeks Theil Kawasan Timur Indonesia Tahun 2010-2024

Provinsi - Kawasan Timur Indonesia - Indeks Theil														
Tahun	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat	Maluku	Maluku Utara	Papua Barat	Papua	Kawasan Timur Indonesia
2010	0,90	3,78	1,37	0,95	1,23	1,22	1,24	0,84	0,84	1,03	1,06	1,44	1,23	0,89
2011	0,90	2,87	1,35	0,94	1,24	1,22	1,25	0,84	0,84	1,10	1,07	1,45	1,25	0,83
2012	0,90	2,34	1,31	0,94	1,29	1,22	1,24	0,83	0,85	1,11	1,06	1,43	1,27	0,82
2013	0,89	2,20	1,30	0,94	1,33	1,22	1,20	0,82	0,86	1,11	1,08	1,40	1,28	0,82
2014	0,89	1,94	1,29	0,93	1,29	1,22	1,29	0,81	0,87	1,12	1,04	1,33	1,29	0,82
2015	0,90	2,62	1,29	0,92	1,39	1,20	1,22	0,80	0,87	1,12	1,04	1,30	1,28	0,86
2016	0,90	2,74	1,30	0,93	1,39	1,19	1,22	0,81	0,85	1,13	1,05	1,28	1,27	0,88
2017	0,90	2,47	1,30	0,93	1,38	1,19	1,22	0,81	0,84	1,13	1,03	1,26	1,29	0,87
2018	0,90	2,00	1,29	0,94	1,69	1,18	1,22	0,80	0,83	1,16	1,02	1,27	1,28	0,89
2019	0,90	1,92	1,29	0,93	1,76	1,17	1,20	0,80	0,82	1,13	1,02	1,30	1,38	0,88
2020	0,90	2,44	1,27	0,94	1,58	1,16	1,18	0,83	0,83	1,07	1,06	1,24	1,46	0,85
2021	0,91	2,42	1,25	0,94	1,76	1,16	1,16	0,83	0,85	1,09	1,46	1,13	1,39	0,84
2022	0,90	2,68	1,25	0,93	1,91	1,18	1,15	0,82	0,85	1,09	1,94	1,16	1,34	0,84
2023	0,91	2,49	1,24	0,92	1,93	1,17	1,14	0,82	0,84	1,10	2,06	0,83	1,00	0,94
2024	0,91	2,69	1,25	0,92	1,95	1,16	1,01	0,82	0,84	1,10	2,03	0,82	1,06	1,01
Rata-Rata	0,90	2,51	1,29	0,93	1,54	1,19	1,20	0,82	0,85	1,11	1,27	1,24	1,27	0,87

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3 nilai rata rata Indeks Theil pada Kawasan Timur Indonesia selama periode 2010–2024, tingkat ketimpangan antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarprovinsi. Berdasarkan hasil perhitungan, Gorontalo memiliki rata-rata Indeks Theil terendah yaitu sebesar 0,82, diikuti Sulawesi Barat sebesar 0,85 dan Kawasan Timur Indonesia secara agregat sebesar 0,87. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di wilayah tersebut relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Selain itu, Bali dan Sulawesi Utara juga memiliki tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah dengan nilai masing-masing sebesar 0,91 dan 0,93.

Di sisi lain, beberapa provinsi memiliki nilai Indeks Theil yang lebih tinggi, seperti Maluku sebesar 1,11, Sulawesi Selatan sebesar 1,19, Sulawesi Tenggara sebesar 1,20, Papua Barat sebesar 1,24, Maluku Utara sebesar 1,27, Papua sebesar 1,27, serta Nusa Tenggara Timur sebesar 1,29. Nilai indeks yang lebih besar tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah di provinsi-provinsi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan nilai indeks yang mendekati nol. Provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 1,54 dan Nusa Tenggara Barat sebesar 2,51. Tingginya nilai Indeks Theil pada kedua provinsi tersebut menunjukkan bahwa disparitas pembangunan antarwilayah masih cukup besar dibandingkan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia.

Tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Desentralisasi Fiskal (DESF), dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap tingkat ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia selama periode tahun 2010 hingga 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dalam kerangka data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*, yaitu sebanyak 13 provinsi di Kawasan Timur Indonesia selama periode penelitian. Pengolahan data dilakukan

dengan menggunakan perangkat lunak statistik *E-Views 14*. Melalui analisis regresi data panel ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Indeks Pembangunan Manusia, Desentralisasi Fiskal, dan Penanaman Modal Asing terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Berikut ini adalah hasil metode terpilih REM (*Random Effect Model*) faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Kawasan Timur Indonesia.

Model Terpilih Regresi Data Panel versi (Indeks Williamson & Indeks Theil)

Berikut ini adalah hasil metode terpilih REM (*Random Effect Model*) faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Kawasan Timur Indonesia.

Tabel 4 Hasil Perhitungan Random Effect Model (Indeks Williamson)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.230377	0.287858	4.274247	0.0000
IPM	-0.009316	0.004300	-2.166503	0.0315
DESF	-0.001358	0.002687	-0.505469	0.6138
PMA	0.000157	1.26E-05	12.48362	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.373819	0.8529
Idiosyncratic random			0.155223	0.1471
Weighted Statistics				
R-squared	0.453982	Mean dependent var		0.070416
Adjusted R-squared	0.445406	S.D. dependent var		0.209807
S.E. of regression	0.156245	Sum squared resid		4.662813
F-statistic	52.93520	Durbin-Watson stat		0.600361
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah (Eviews 14)

Berdasarkan tabel 4 Model KPW dengan pendekatan *Random Effect Model* (Indeks Williamson) menjelaskan bahwa dari tiga variabel bebas yang digunakan menunjukkan hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap KPW yaitu IPM dan PMA. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas masing-masing variabel, seperti variabel IPM memiliki pengaruh yang signifikan dengan probabilitas sebesar 0,0315 variabel DESF tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan probabilitas sebesar 0,6138 kemudian variabel PMA memiliki pengaruh yang signifikan dengan probabilitas sebesar 0,0000.

Tabel 5 Hasil Perhitungan Random Effect Model (Indeks Theil)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.089915	0.307088	6.805578	0.0000
IPM	-0.016090	0.004543	-3.541597	0.0005
DESF	0.005858	0.002859	2.048820	0.0418
PMA	0.000111	1.33E-05	8.327504	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.422924	0.8694
Idiosyncratic random			0.163920	0.1306
Weighted Statistics				
R-squared	0.304787	Mean dependent var		0.123409
Adjusted R-squared	0.293868	S.D. dependent var		0.194453
S.E. of regression	0.163402	Sum squared resid		5.099730
F-statistic	27.91202	Durbin-Watson stat		0.737738
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah (Eviews 14)

Berdasarkan tabel 5 Model KPW dengan pendekatan *Random Effect Model* (Indeks Theil) menjelaskan bahwa ketiga variabel bebas yang digunakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap KPW yaitu IPM, DESF dan PMA. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas masing-masing variabel, seperti variabel IPM memiliki pengaruh yang signifikan dengan probabilitas sebesar 0,0005 selanjutnya variabel DESF memiliki pengaruh yang signifikan dengan probabilitas sebesar 0,0418 kemudian variabel PMA memiliki pengaruh yang signifikan dengan probabilitas sebesar 0,0000.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM), baik pada pengukuran ketimpangan wilayah menggunakan versi Indeks Williamson maupun Indeks Theil, diperoleh hasil yang relatif konsisten. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah, Desentralisasi Fiskal (DESF) juga memiliki arah pengaruh negatif, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan pengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Perbedaan hasil hanya terletak pada tingkat signifikansi variabel desentralisasi fiskal, di mana pada versi Indeks Williamson pengaruhnya tidak signifikan, sedangkan pada versi Indeks Theil menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap ketimpangan wilayah. Secara umum, kedua indeks menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia dan penguatan desentralisasi fiskal cenderung mampu menurunkan ketimpangan wilayah, sementara peningkatan investasi asing justru cenderung memperbesar ketimpangan antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Random Effect Model (REM), variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia mampu menurunkan tingkat ketimpangan antarwilayah. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Sen, (1999) dan Todaro & Smith, (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dapat memperluas kesempatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka produktivitas tenaga kerja dan kapasitas ekonomi daerah juga akan meningkat sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2018), Azim et al., (2022), Aditya et al., (2025) dan Hartati, (2019) yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan wilayah.

Selanjutnya, hasil penelitian hasil dari statistik pada versi Indeks Theil menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal (DESF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal cenderung menurunkan ketimpangan antarwilayah. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pandangan Oates, (2006) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong pemerataan pembangunan karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kebijakan sesuai kebutuhan lokal, hal tersebut sejalan dengan penelitian Santi & Iskandar, (2021) dan Latifah & Rahayu, (2019). Namun demikian, berdasarkan hasil pengujian statistik pada model Indeks Williamson, pengaruh desentralisasi fiskal terbukti tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri et al., (2023) Fadli, (2016) dan Lessmann, (2012) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah, terutama pada daerah dengan kapasitas fiskal dan kualitas institusi yang belum merata.

Sementara itu, variabel Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PMA cenderung memperbesar ketimpangan antarwilayah. Secara teoritis, hasil tersebut sejalan dengan teori investasi internasional yang dikemukakan Hymer dalam (Lizondo, 1990) yang menjelaskan bahwa perusahaan multinasional cenderung memilih wilayah yang memiliki keuntungan lokasi seperti infrastruktur yang memadai, pasar yang besar, serta kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Akibatnya, investasi asing lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang telah maju sehingga memperlebar kesenjangan pembangunan dengan wilayah lain yang relatif tertinggal.

Selain itu, teori New Economic Geography dan teori aglomerasi juga menjelaskan bahwa investasi asing cenderung terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki keunggulan lokasi dan infrastruktur. Konsentrasi investasi tersebut kemudian menciptakan efek pengganda ekonomi di wilayah tertentu sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maju, sementara wilayah lain berkembang lebih lambat. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong meningkatnya disparitas pembangunan antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mansyur et al., (2021), Rosmeli, (2015), Haidir et al., (2020) Awalia et al., (2024) dan Benius & Veronika, (2025) yang menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa investasi asing di Kawasan Timur Indonesia masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki

keunggulan ekonomi dan infrastruktur, sehingga manfaat investasi belum tersebar secara merata ke seluruh daerah. Namun demikian, secara teoritis PMA juga dapat berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan apabila investasi asing tersebar lebih merata dan didukung oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta kapasitas daerah dalam menyerap manfaat investasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian pada hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Indeks Williamson selama periode 2010–2024, tingkat ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan variasi tingkat disparitas antarwilayah. Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, sedangkan Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta Kawasan Timur Indonesia secara agregat berada pada kategori ketimpangan sedang. Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi. Sementara itu, Papua Barat dan Papua menunjukkan tingkat ketimpangan sangat tinggi, yang mengindikasikan masih besarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah di kedua provinsi tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Indeks Theil selama periode 2010–2024, ketimpangan pembangunan intra-wilayah antar kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia juga menunjukkan disparitas yang cukup signifikan. Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, dan Sulawesi Utara memiliki tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah karena nilai indeks lebih mendekati nol. Sebaliknya, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih tinggi. Adapun provinsi dengan tingkat ketimpangan intra-wilayah tertinggi adalah Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan antar kabupaten/kota di beberapa provinsi Kawasan Timur Indonesia masih belum merata.
3. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan regresi terpilih Random Effect Model antara versi Indeks Williamson dan Indeks Theil, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sama-sama memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Sedangkan pada variabel Desentralisasi Fiskal (DESF) menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah dalam hal ini pada versi Indeks Williamson pengaruhnya tidak signifikan, sedangkan pada model Indeks Theil pengaruhnya signifikan. Kemudian, variabel Penanaman Modal Asing (PMA) sama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah baik versi Indeks Williamson dan Indeks Theil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. N., Suparta, I. W., & Taher, A. R. Y. (2025). Analysis of the Effect of Investment, Agglomeration, and Human Development Index on Regional Inequality in Eastern Indonesia 2019-2023. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*

- (JEBS), 5(3), 588–596. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v5i3.2841>
- Awalia, R. P. R., Citra, A. K., Samsir, A., Irwandi, I., & Rahim, A. (2024). Analysis of Regional Disparities in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 10, 22–30. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol10.iss02.2024.1954>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). *Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia*. 1, 1–16.
- Benius, & Veronika, E. (2025). ASEAN Economic Integration and Regional Development Inequality: An Empirical Analysis, 2019–2024. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v8>
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2022-2024*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEzIzI=/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS. (2025). *Kontribusi PDRB Menurut Wilayah*.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>
- Dewanto, F. W., & Rahmawati, F. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah (Studi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia) Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 4, 47–60. <https://doi.org/10.30737/ekonika.xxx>
- Fadli, F. (2016). Fiscal Decentralization and Regional Disparity in East and West Indonesia's Provinces. *Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 1–17.
- Fajri, C., Kadek, A. I., Sutrisna, D., Wilmar, A., Ananda, S., Artha, I. K. D. S., & Salim, W. (2023). *Regional Dimensions of Infrastructure Development in Indonesia* (Vol. 1).
- Haidir, M. A., Zamhuri, M. Y., & Abdiviane, I. T. (2020). Intertemporal Analysis of Indonesia's Regional Inequality. *Global Scientific*, 8(11), 743–756.
www.globalscientificjournal.com
- Hartati, Y. S. (2019). Analisis Disparitas Wilayah Antar Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 1.
- Hidayat, M., Darwin, R., & Hadi, M. F. (2018). Inequality of Interregional Development in Riau Indonesia; Panel Data Regression Approach. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 184–189.
<http://www.econjournals.com>
- Juanda, bambang, & Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi* (Edisi 1). IPB.
- Korimah, I., & Yuniasih, A. F. (2019). *DESENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN ANTARKABUPATEN/ KOTA DI SULAWESI SELATAN: IMPLEMENTASI TUJUAN SDG's KE-10*. 1–10.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era baru Pembangunan Daerah* (Edisi 3). Erlangga.
- Kurniawan, H., De Groot, H. L. F., & Mulder, P. (2019). Are poor provinces catching-

- up the rich provinces in Indonesia? *Regional Science Policy and Practice*, 11(1), 89–108. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12160>
- Latifah, & Rahayu, D. (2019). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Antar Daerah. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 983–994.
- Lessmann, C. (2012). *Foreign Direct Investment and Regional Inequality: A Panel Data Analysis*. www.RePEc.org
- Liu, Y., Martinez-Vazquez, J., & Wu, A. M. (2014). Fiscal Decentralization, Equalization, and Intra-Provincial Inequality in China. *International Center for Public Policy*, 14–32.
- Lizondo, J. S. (1990). *Foreign Direct Investment*.
- Mansyur, K., Nursini, & Hamrullah. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Review*, 1(2). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>
- Nugraha, A. T., & Prayitno, G. (2020). Regional Disparity in Western and Eastern Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(4), 101–110.
- Oates, W. E. (2006). *On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization*. <https://www.researchgate.net/publication/5110773>
- Pourfaraj, A., Mehregan, N., Karimi Potanlar, S., & Eskandariata, M. R. (2019). Regional Inequality in Iran and the Impact of Economic Factors: A Spatial Econometric Approach. In *Econ. Rev* (Vol. 23, Number 2).
- Putri, H. T., Susetyo, D., Marissa, F., & Sukanto, S. (2023). The Effect of Economic Growth, Fiscal Decentralization, Fiscal Stress, and Economic Openness on Regional Inequality. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 181–192. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.19113>
- Rosmeli. (2015). DAMPAK INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA. *Paradigma Ekonomi*, 10.
- Rosmeli, & Nurhayani. (2014). Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. *Mankeu*, (1), 374–463. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/1861>
- Salsabillah, H., & Fitanto, B. (2024). DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS ANTAR WILAYAH DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2014-2019. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(2), 468–482. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.11>
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KETIMPANGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3).
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sjafrizal. (2008). *EKONOMI REGIONAL TEORI DAN APLIKASI* (Cetakan Pertama). BADUOSE MEDIA.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Cetakan ke-1). RajaGrafindo Persada.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya di Indonesia* (Edisi

1). Rajawali Pers.

Sukmawati, A. T., & Robertus, M. H. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Industri, PMDN, Belanja Pemerintah, dan IPM Terhadap Ketimpangan Wilayah di Kawasan KEDUNGSEPUR Tahun 2011-2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 12(3), 1–12.
<https://doi.org/10.14710/djoe.39352>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi 11). Erlangga.